

**ANALISIS KONTRIBUSI TAMAN WISATA ALAM BANTIMURUNG
BULU SARAUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS**

Diajukan Oleh :

RINALDI

4516 011 008



SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah satu persyaratan

Guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu
Saraung Terhadap Pendapatan Asil Daerah (PAD) Kabupaten
Maros

Nama Mahasiswa : RINALDI

Stambuk/NIM : 4516011008

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Ekonomi Pembangunan


Tempat Penelitian : Dispenda Kabupaten Maros dan Dinas Pariwisata Kabupaten
Maros

Telah Disetujui.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Palipada Palisuri, M.Si


Rafiuddin, SE., M.Si


Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan**


Dr. H. A. Rafiuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH


Rafiuddin, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinaldi
NIM : 4516011008
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung
Bulusaraung Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari sana adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya ataupun dapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian penelitian ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 20 Agustus 2021


Rinaldi

ANALISIS KONTRIBUSI TAMAN WISATA ALAM BANTIMURUNG BULU SARAUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS

**Oleh :
Rinaldi**

**Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRAK

Rinaldi. 2021. Analisis Kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, (dibimbing oleh **Drs. Palipada Palisuri, M. Si dan Rafiuddin, SE., M.Si**) program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros, untuk mengetahui jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros serta untuk mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik, terutama mengenai kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap PAD di Kabupaten Maros dan sejauh mana ilmu yang di dapatkan di Universitas dapat di terapkan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Kontribusi Taman Wisata Bantimurung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros serta factor-faktor yang mendorong dan menghambat potensi objek wisata alam Bantimurung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumendi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.

Hasil penelitian bahwa nilai penerimaan PAD Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019, namun pada tahun 2020 PAD Kabupaten Maros mengalami penurunan. Dari perhitungan kontribusi nilai penerimaan retribusi taman wisata alam Bantimurung terhadap PAD Kabupaten Maros tahun 2016 – 2020 terlihat bahwa nilai kontribusi yang terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai 4,49%, sedangkan nilai kontribusi 4 tahun setelahnya relatif kecil atau menurun terutama pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 1,95%, hal ini disebabkan terjadinya pandemic covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibuat untuk mnecegah penyebaran virus corona di Indonesia sehingga parawisatawan baik local maupun mancanegara menurun secara drastic pada tahun tersebut. Sehingga dapat kita ketahui kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, kontribusi

**ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF BANTIMURUNG BULU
SARAUNG NATURAL TOURISM PARK TO REGIONAL
ORIGINAL INCOME (PAD)
MAROS DISTRICT**

By :

Rinaldi

**Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business
Makassar Bosowa University**

ABSTRACT

Rinaldi. 2021. Analysis of the Contribution of the Bantimurung Bulu Saraung Nature Park to the Regional Original Income (PAD) of Maros Regency, (supervised by **Drs. Palipada Palisuri, M.Si and Rafiuddin, SE., M.Si**) Development Economics study program, Faculty of Economics and Business Bosowa University.

This study aims to determine the contribution given by the Bantimurung Nature Park to Maros Regency's Original Revenue, to find out the types of Maros Regency's Original Revenue Sources and to gain knowledge about public sector accounting, especially regarding the contribution of Bantimurung Nature Park to PAD in the Regency. Maros and the extent to which the knowledge gained at the University can be used in society.

This study uses a qualitative approach. The focus in this research is how the contribution of the Bantimurung Tourism Park to the Regional Original Income of Maros Regency and the factors that encourage and inhibit the potential of Bantimurung's natural tourism objects. Sources of data used in this study were interviews and documents at the Department of Culture and Tourism of Maros Regency.

The results of the study show that the PAD revenue of Maros Regency continues to increase from 2016 to 2019, but in 2020 the PAD of Maros Regency has decreased. From the contribution of the levy value of the Bantimurung natural tourism park to the PAD of Maros Regency in 2016 - 2020, it can be seen that the largest value contribution occurred in 2016 which reached 4.49%, while the contribution value 4 years after that was retrained or decreased, especially in 2020, which was only 1,95%, this was due to the COVID-19 pandemic that hit all parts of Indonesia which caused Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which were made to prevent the spread of the corona virus in Indonesia so that both local and foreign tourists decreased drastically that year. So that we can contribute the Bantimurung Nature Park is very influential on the Regional Original Income (PAD) of Maros Regency.

Keywords: Regional Original Income, contribution

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bias menyelesaikan skripsi dengan mudah dengan judul “ANALISIS KONTRIBUSI TAMAN WISATA ALAM BANTIMURUNG BULU SARAUNG TERHADAP PENDAPATN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas EKonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bosowa Makassar.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orangtua penulis, Rifai Ramli dan Badariah yang selalu memberi semangat dan motivasi serta doa secara tulus dan penuh kesabaran kepada penulis, dan selama ini selalu memberi kebutuhan perkuliahan penulis.

Dalam Penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual,Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan tulisan penulisan skripsi banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M. Eng. Selaku rector Universitas Bosowa.

2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si.,SH.,MH.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Bapak Drs. Palipada Palisuri, M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature kepada penulis.
5. Bapak Rafiuddin SE., M.Si selaku pembimbing sekaligus ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
6. Seluruh dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staff fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
7. Bapak Yusriadi, SS selaku kepala bidang Pariwisata Kabupaten Maros beserta seluruh staff atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.
8. Seluruh teman seperjuangan dan teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnins Universitas Bosowa maupun teman di luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendukung penulis dari awal berkuliah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudari Mariana Yesi Pakiding yang selalu membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ekonomi Pembangunan.

Makassar, 20 Agustus 2021

Penulis

Rinaldi

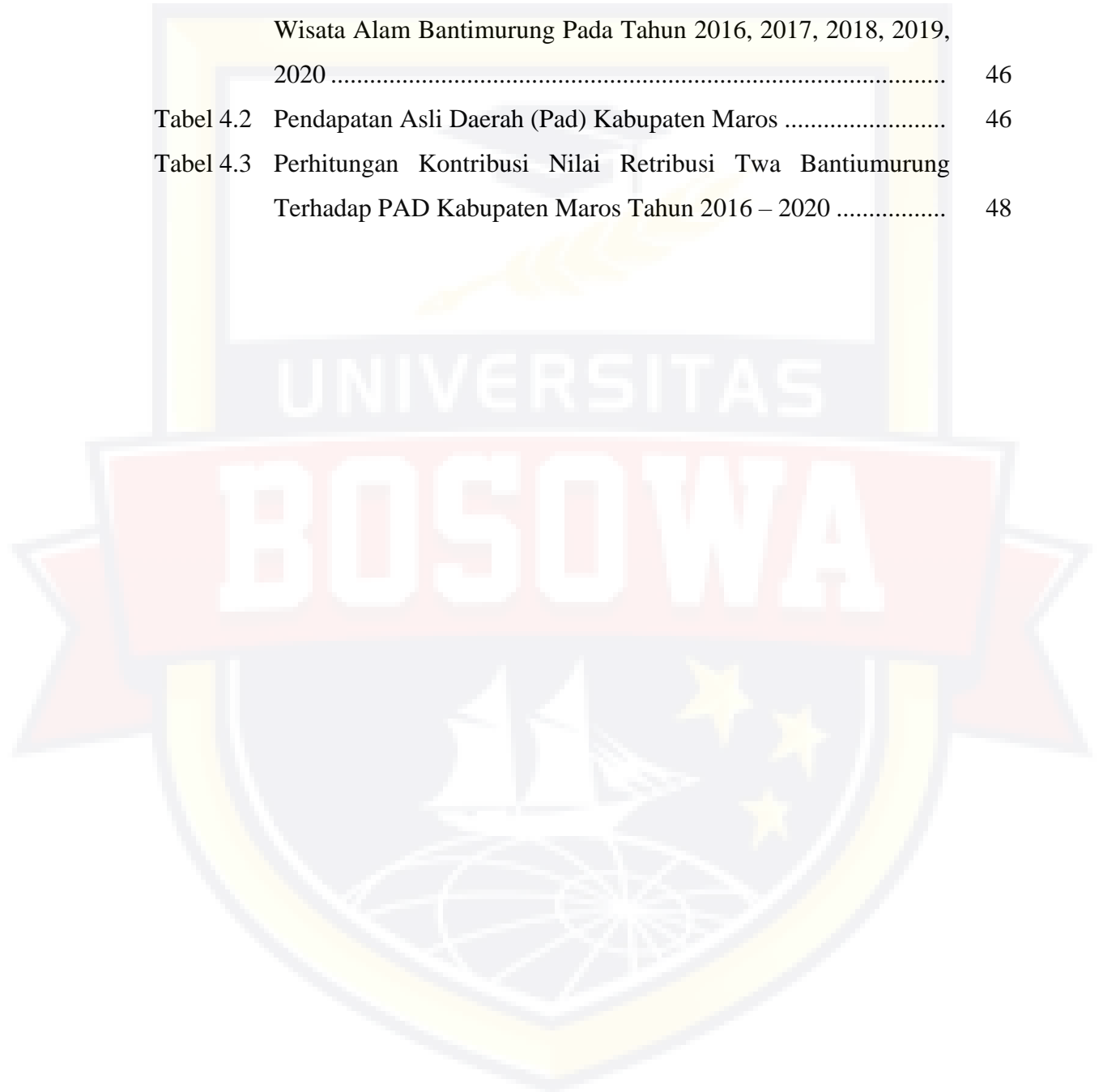
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerang Teori	6
2.1.1 Pengertian Pendapatan	6
2.1.2 Pendapatan Daerah	7
2.1.3 Pariwisata	15
2.2 Kerangka Pikir	20
2.3 Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	22

3.2 Metode Pengumpulan Data	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.4 Metode Analisis	24
3.5 Definisi Operasional	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian.....	28
4.1.1 Sejarah Nasional Bantimurung Bulusaraung	28
4.1.2 Sejarah Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusaraung .	31
4.1.3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	34
4.1.4 Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Maros	38
4.1.5 Tujuan dan sasaran	43
4.2 Deskripsi Data	45
4.3 Analisa Data	51
4.3.1 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam Meningkatkan PAD melalui Pengembangan objek wisata alam Bantimurungo.....	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Taman Wisata Alam Bantimurung Pada Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020	46
Tabel 4.2	Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Maros	46
Tabel 4.3	Perhitungan Kontribusi Nilai Retribusi Twa Bantiumurung Terhadap PAD Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilakukan pemerintah dan untuk seluruh masyarakat dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas harus dibarengi dengan suatu usaha seperti yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini yaitu melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan pembangunan secara bertahap, berencana dan berorientasi pada bidang-bidang pembangunan yang sangat mendesak dan turut mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia merupakan rangkaian upaya pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan ini diarahkan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian pembangunan nasional berorientasi pada upaya pencapaian masyarakat adil dan makmur, baik itu pembangunan yang dilaksanakan dalam skala nasional maupun yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

Tidak cukup hanya mengandalkan subsidi atau bantuan yang berasal dari pemerintah pusat. Apalagi era otonomi sekarang ini menghendaki daerah berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri.

Salah satu sektor yang merupakan sumber dana bagi daerah untuk mengatasi masalah pembiayaan pembangunan adalah kepariwisataan. Dapat diketahui bahwa kegiatan kepariwisataan sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang dapat menunjang Pendapatan Asli daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah apabila dikelola dengan baik dan didorong oleh beberapa variabel yang memegang peranan penting disektor ini, misalnya dari segi keamanan, kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang.

Penerimaan retribusi daerah merupakan bagian yang cukup penting didalam menghimpun keuangan daerah. Menggali potensi yang ada di daerah merupakan salah satu pemanfaatan sumber penerimaan, sementara pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menciptakan kegiatan ekonomi daerah yang betul-betul mencapai sasaran yang diinginkan artinya dana yang digunakan untuk membangun bagi masyarakat daerah tersebut.

Salah satu perwujudan otonomi daerah (OTODA) dalam rangka membangun misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia di masa depan dalam rangka memperoleh pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah maka perlunya dilakukan pembangunan daerah. Dalam perwujudan otonomi daerah (OTODA) Pemerintahan menerapkan azas demokrasi yang kemudian diberi pertanggungjawaban kepada setiap daerah. Pemerintahan yang demokratis dapat membuat kehidupan rakyat menjadi sejahtera serta dapat membangun semangat kepada setiap orang

sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan di berbagai daerah. Sejak di berlakukannya OTODA yaitu pada tanggal 1 Januari 2001, maka daerah yang berada di kabupaten/kota diberi kebebasan untuk mengatur masing- masing keluarganya sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini suatu daerah dapat dikatakan otonom dapat dilihat pada tingkat kemampuan keuangan suatu daerah tersebut. Jadi, setiap daerah diwajibkan mempunyai kekuasaan serta pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan uang, serta dapat mengelola juga dapat berkontribusi langsung dalam pembangunan daerahnya. Dengan pembagian bantuan yang diberikan pusat berguna untuk membantu meminimalisir pengeluaran masyarakat pada suatu daerah sehingga pemerintah mengharapkan agar PAD terkhusus pada pajak juga retribusi dalam suatu daerah menjadi suatu bagian sumber keuangan yang besar, dan didukung oleh perimbangan keuangan yang di kelola oleh Pusat sehingga hal ini bermanfaat sebagai syarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara .

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut di sebabkan oleh suatu pembiayaan serta pelaksanaan pada pemerintahan dan juga pembangunan yang di selenggarakan Pemerintah mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten maros, misalnya pada tahun 2017 sampai 2018 yaitu meningkat mencapai sebesar Rp 1,4 triliun. Selanjutnya pada tahun 2018 menuju 2019, perkembangan berefek pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 91 milyar rupiah

Taman wisata alam ini juga terkenal sehingga sering dikunjungi wisatawan asing, membuat Taman Wisata Alam ini menjadi sangat menarik dan patut untuk di kunjungi. Kawasan Wisata Alam Nasional Bantimurung ini terletak di Desa Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Taman Wisata Alam ini di buka setiap hari juga untuk umum. Taman wisata ini ramai di kunjungi ketika hari libur misalnya Sabtu dan Minggu.

Penerimaan retribusi kawasan atau Taman Wisata Alam Bantimurung (TWAB) sangat berpengaruh pada sumber penerimaan pemerintah daerah sehingga pemasukan yang relatif besar serta kontribusinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros ini.. Dalam hal ini, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada ataman wisata alam ini guna untuk memenuhi hal yang dibutuhkan. Maka peneliti mengambil judul “ Kontribusi Kawasan Wisata Alam Bantimurung Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk tercapainya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

“Bagaimana kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap PAD di Kabupaten Maros dan sejauh mana ilmu yang didapatkan di Universitas dapat diterapkan di masyarakat.
2. Keuntungan untuk Pemerintah Kabupaten Maros. Adanya penelitian ini diharap dapat memberi masukan atau gambaran kepada Pemerintah yang berada di Kabupaten Maros.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan untuk semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pendapatan

Dalam The World Book Encyclopedia (1986; 86) dijelaskan bahwa; “*Income tax is a tax on the earning of individual, corporation, estates, and trust. Nearly all Nations levy income tax. Various levels of government use income taxes. In the United States, income taxes are levied by the federal government most state government, and some local government. In Canada, the federal government and all the country’ 10 provinces levy income taxes*”.

Definisi ini dapat diartikan secara bebas, bahwa pendapatan pajak adalah pajak atas pendapatan atau penerimaan individu, perusahaan, perkebunan atau tanah, surat-surat berharga atau kepercayaan. Hampir semua negara menerima iuran atau pajak pendapatan. Berbagai level pemerintahan memungut dan menggunakan pendapatan pajak. Di Amerika Serikat pendapatan pajak adalah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Federal Government), dan pemerintah-pemerintah lokal. Di Canada, iuran pajak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan 10 daerah provinsi menetapkan dan menerima pendapatan pajak.

Pengertian pendapatan menurut beberapa ahli :

1. Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin

mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. (Sukirno 2000)

2. Pendapatan adalah suatu pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya *owners equity*, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities*. (Munandar 2006)
3. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. (Poniwati Asmie 2008)

2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah).

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.

1. Sumber-sumber penerimaan daerah

A. Pendapat Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017 :23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carrunia, 2017 :119).

Secara eksplisit dalam penjelasan Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menyatakan sebagai berikut (Penjelasan Undang-undang No.5, 1974:102): “ Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan

yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan (Devas, 2001: 31). PAD (Widjaja, 2001: 42) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan asli daerah harus dominan dan mampu memikul beban biaya yang diperlukan daerah.

Usaha Daerah yang sah karena Pendapatan asli daerah harus dominan dan mengingat titik berat otonomi daerah adalah di kabupaten/kota maka kabupaten/kota dituntut untuk lebih menggali dan lebih meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dan kreativitas dari Pemerintah kabupaten untuk mengupayakan peningkatan PAD. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu secara seksama guna menentukan sumber yang potensial sehingga biaya pengumpulannya dapat ditekan seminimal mungkin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai salah satu sumber PAD harus dominan dan mampu memikul beban biaya yang diperlukan daerah. PAD terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Usaha Perusahaan Daerah
- d. Lain-lain Usaha Daerah yang sah

Karena Pendapatan asli daerah harus dominan dan mengingat titik berat otonomi daerah adalah di kabupaten/kota maka kabupaten/kota dituntut untuk lebih menggali dan lebih meningkatkan Pendapatan asli daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dan kreativitas dari Pemerintah kabupaten untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan asli daerah. Semakin besar sumbangan PAD kepada APBD berarti semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah atasannya. Peningkatan dan pengembangan sumber atau potensi Pendapatan asli daerah akan sangat mendukung otonomi suatu daerah jika penarikan Pendapatan asli daerah memenuhi kriteria hasil, keadilan, efisiensi, efektivitas dan kecocokan obyek sebagai sumber PAD. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu secara seksama guna menentukan sumber yang potensial sehingga biaya pengumpulannya dapat ditekan seminimal mungkin. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

a. Pajak Daerah

b. Pengertian Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dirinci menurut obyek pendaptan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut *Mardiasmo* (2011 :12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah Otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah kabupaten/kota. (*M ardiasmo*, 2000:93)

c. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu : (*M ardiasmo*, 2000:93)

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota), terdiri atas :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan jalan

f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian

Golongan C

g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang belum

dikenakan oleh Negara (pusat). Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki obyek pajak yang lebih tinggi tingkatnya. Tarif Pajak Daerah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing daerah.

b. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajakdaerah dan retribusi daerah.

Contoh retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Retribusi parkir

3. Retribusi pelayanan pasar
4. Retribusi terminal dan sebagainya.

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
3. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan antara lain:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan.
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

B. Dana Perimbangan

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

1. Dana bagi hasil

Jenis dana bagi hasil dirincimenurut obyek pendapatan yang mencakup :

a. Bagi hasil pajak

b. Bagi hasil bukan pajak

2. Dana alokasi umum

3. Dana alokasi khusus

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

1. Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, badan/lembanga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah negara asing, badan/lembanga asing, badan/lembanga internasional, Pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang atau

jasa, termasuk tenaga asli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

2. Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah

2.1.3 Pariwisata

1. Sejarah Pariwisata

Pariwisata telah dikenal didunia sejak zaman prasejarah namun tentu saja pengertian pariwisata pada zaman itu tidak seperti saat ini, sejak dahulu kala bangsa-bangsa di dunia seperti Sumeria, Poenesia, sampai dengan Romawi sudah melakukan perjalanan, namun tujuan masih untuk berdagang, menambah pengetahuan ilmu hidup, ataupun ilmu politik. Selanjutnya setelah modernisasi meluas di segala penjuru dunia, khususnya setelah terjadinya revolusi industri di Inggris, maka muncul traveler-traveler secara bergantian melakukan perjalanan pariwisata seperti yang kita kenal saat ini.

Sedangkan di Indonesia sendiri, pariwisata telah dikenal sejak zaman kerajaan yang menguasai wilayah nusantara, walaupun masih berkepentingan untuk saling menguasai, namun tidak dapat dipungkiri akan adanya pertukaran kebudayaan antar wilayah. Pariwisata modern Indonesia mulai dikenal sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia.

Melalui *Vereeniging Toesristen Verkel* (VTV) yang merupakan suatu badan atau official tourist bureau. Kedudukan VTV selain sebagai lembaga pariwisata juga bertindak sebagai tour operator atau travel agent.

Pariwisata pada masa ini, badan pariwisata yang di bentuk oleh Belanda hanya memprioritaskan pada wisatawan kulit putih saja, sedangkan bagi pribumi sendiri diberikan pembatasan seperti dilakukan di sector-sektor lainnya. Setelah kemerdekaan, pariwisata Indonesia berangsur-angsur menunjukkan kenaikan. Selama periode repelita I sampai dengan repelita IV wisatawan di Indonesia meningkat secara drastis, bahkan melebihi target yaitu 11.626.000 juta wisatawan yang ditargetkan hanya 3.000.000 orang saja.

2. Obyek Wisata

Suwantoro (2004 : 23) menjelaskan obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan :

a. Obyek wisata dan daya tarik wisata alam

Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.

b. Obyek wisata dan daya tarik budaya

Obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, antraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya.

c. Obyek wisata dan daya tarik oada minat khusus

Obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olahraga, memancing dan lain-lain.

3. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian objek dan daya tarik w isata menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 yang menjadi sasaran perjalanan wisata yaitu meliputi :

- a. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka.
 1. Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
 2. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat- tempat ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain.

b. Usaha-usaha yang Terkait di Bidang Pariwisata

I. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

II. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti : Kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah (candi, makam), museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat, dan yang bersifat alamiah : keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan sebagainya.

III. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata, yakni :

1. Usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata);
2. Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya;
3. Usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata. Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Pendapatan Pariwisata, maka dari rumus di atas disesuaikan menjadi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Sektor Pariwisata}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}} \times 100\%$$

Dalam mengukur efisiensi kinerja pemerintah, ada beberapa acuan untuk menyatakan kinerja pemerintahan efisien atau tidak, antara lain:

- a) Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 1998 Untuk mengukur efisien tidaknya penerimaan pendapatan sektor pariwisata digunakan tolok ukur efisiensi

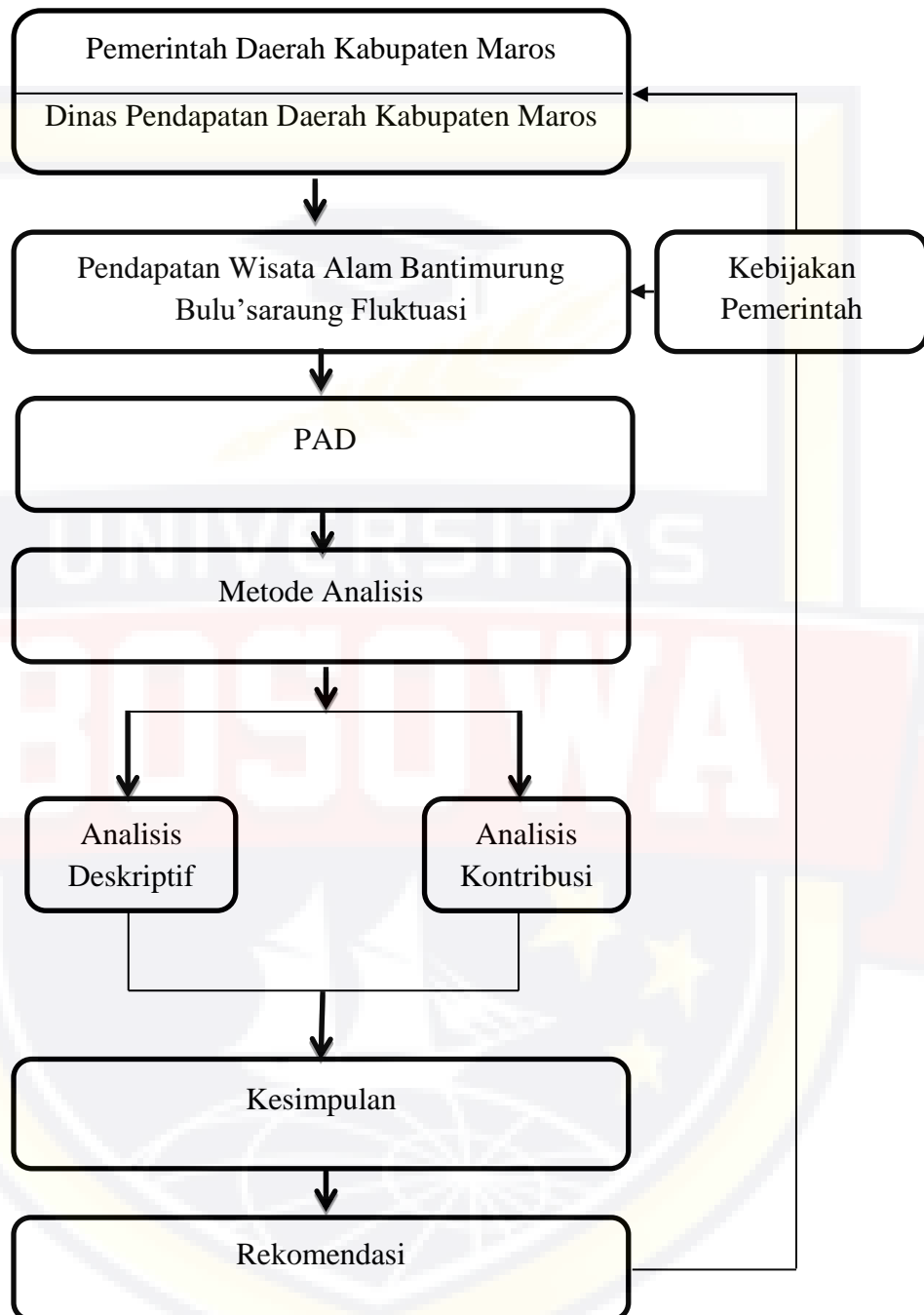
dengan membandingkan angka rasio yang diperoleh dengan standar rasio pendapatan sektor pariwisata kabupaten sebesar 5 % dari realisasi.

Cara pengukurannya :

1. Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar ratio sebesar 5% dari realisasi, maka dapat dikatakan efisien.
 2. Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5 % dari realisasi, maka dapat dikatakan kurang efisien.
- b) Menurut *Mahmudi* (2007:130), “Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

Kedua acuan diatas kurang sesuai dengan topik yang diteliti penulis, karena keduanya digunakan untuk menentukan efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah sedangkan dalam penelitian ini yang diukur adalah efisiensi Pariwisata. Dengan demikian maka dalam penelitian ini yang dilihat adalah kecenderungan efisiensi apakah semakin naik, semakin turun, atau relatif sama. Dengan kata lain semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pariwisata semakin baik.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir di atas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

Di duga bahwa Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Maros mengalami fluktuasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang berlokasi di Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan lamanya di mulai februari sampai dengan bulan Maret 2021.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*)

1. Penelitian lapangan (*Field research*) di lakukan melalui dengan wawancara dengan;
 - a. Humas Dinas Pendapatan Kabupaten Maros
 - b. Bidang Keuangan
2. Penelitian kepustakaan (*Library research*) mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis penelitian yaitu terbagai menjadi:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam- dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan

populasi atau samplangnya terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bias menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Periset lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi

3.2.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau yang disebut "*first hand information*". Sumber data primer dalam penulisan laporan ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden penelitian, yang dalam hal ini menggunakan wawancara atau *interview*. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data sekunder

Adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau

dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs, internet dan lainnya. Yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah daftar informasi public Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Maros.

3.4 Metode Analisis

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya nilai kontribusi retribusi Kawasan Wisata Alam Bantimurung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Adapun metode analisis yang digunakan yakni Analisis Deskriptif dan Analisis kontribusi

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pajak daerah di Kabupaten Maros, kemudian juga untuk mengetahui sumbangan jenis-jenis pajak daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis deskriptif ini meliputi beberapa hal, yakni distribusi frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan pengukuran variabilitas (*Wiyono, 2001*).

a. Distribusi frekuensi

Distribusi frekuensi merupakan susunan data-data mentah yang acak dan sulit dibaca yang kemudian disusun berdasarkan kategori tertentu dalam suatu daftar secara sistematis agar mudah dipahami. Distribusi frekuensi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu distribusi frekuensi secara tidak

berkelompok, distribusi rank order, distribusi frekuensi secara berkelompok, dan grafik distribusi.

b. Pengukuran Tendensi Pusat

Pengukuran tendensi pusat merupakan suatu ukuran yang merupakan wakil kumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai data tersebut baik mengenai sampel ataupun populasi. Beberapa macam ukuran tendensi setral yaitu rata-rata (mean), median dan modus. Tendensi pusat digunakan untuk melihat letak bagian terbesar dalam distribusi.

c. Pengukuran Variabilitas

Pengukuran variabilitas untuk menggambarkan derajat berpencarnya data kuantitatif. Ukuran ini terdiri atas rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku dan koefisien variasi, serta varian. Pengukuran variabilitas berfungsi untuk mengetahui homogenitas atau heterogenitas data. Suatu data bias saja memiliki nilai tendensi pusat yang sama namun memiliki nilai variansi yang berbeda.

Dalam analisis deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah memahami data-data yang disajikan. Dalam ilmu perencanaan, penggunaan statistik deskriptif dapat dilakukan untuk mempermudah penyampaian informasi agar mudah diterima dan dipahami.

3.4.2 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan

pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam menghitung besarnya kontribusi digunakan rumus sebagai berikut:

$$x = \frac{P_y}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Jumlah kontribusi yang diberikan

P_y : Jumlah penerimaan dari sektor pajak daerah/retribusi Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung

3.5 Definisi Operasional

Agar penulisan ini lebih terarah dan jelas maka dianggap perlu memberikan suatu pembatasan pengertian terhadap variabel – variabel analisis yang digunakan. Adapun batasan pengertian yang dimaksud yaitu:

1. Kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata atau sumbangan yang berupa uang dari pihak instansi baik negeri maupun swasta terhadap suatu daerah atau Negara.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka bias hidup dan bekerja disuatu tempat tujuan.
4. Obyek wisata adalah tempat rekreasi / tempat berwisata baik berupa alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut atau berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah dll.

5. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang di datangnya.
6. Wisata alam Bantimurung Maros adalah wisata yang menyediakan pemandangan yang sangat indah dan menakjubka. Bantimurung merupakan destinasi wisata Maros yang menjadi andalan, karena di Bantimurung kita dapat melihat indahnya alam dan kesegaran dari perbukitan. Di Bantimurung terdapat 250 spesies kupu-kupu beserta keberagamannya maka dari itu Bantimurung juga mendapat julukan sebagai *The Kingdom of Butterfly*. Selain kupu-kupu Bantimurung juga menyajikan banyak jenis yang jarang ditemukan ditempat lain. Di Bantimurung juga terdapat spesies monyet serta hewan yang dilindungi.
7. Taman Wisata adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan flora, fauna, maupun alam itu sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Nasional Bantimurung Bulusaraung

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ini biasanya disebut TN Babul.. Taman wisata ini terletak serta membentang dari Kabupaten Maros hingga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Indonesia. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memiliki kawasan yang luasnya kurang lebih 43.750 hektar. Taman Wisata Alam ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah.

Kawasan Taman Wisata ini memiliki 2 ciri khas yaitu keanekaragaman kupu – kupu serta kondisi alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan karst, air terjun, dan juga terdapat puluhan gua vertikal dan horizontal. Semua hal ini telah menjadi pesona tersendiri bagi TN Babul, dengan sentuhan alam yang sangat menarik menambah ciri khas TN Babul yang sangat indah dan patut untuk di kunjungi.

Sejarah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung diawali pada saat Alfrad Russel Wallace menjalankan ekspedisi pada tahun 1857. Setelah perjalanan ekspedisi tersebut Alfrad Russel Wallace menerbitkan The Malay Archipelago, hal ini membuat ketertarikan bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian lanjutan. Kawasan Taman Wisata alam ini telah dipilih sebagai tempat untuk pelaksanaan konservasi pada tahun 70-an. Kemudian pada 1989 Kanwil Dephut Sulawesi Selatan menyarankan bahwa taman wisata ini menjadi taman

wisata alam Nasional Hasanuddin. Namun pada tahun 2004 Kementerian kehutanan mencetuskan SK.398/Menhut-II/2004 pada 18 Oktober tahun 2004 yaitu mengenai perubahan fungsi pada kawasan hutan terhadap suatu Kelompok Hutan yang terletak di Bantimurung Bulusaraung yang memiliki 43.750 hektar.

Terdapat beberapa penetapan waktu Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan lengkap yaitu:

Saat memasuki bulan Juli-Oktober pada tahun 1857, Alfred Russel Wallace melakukan eksplorasi di Bantimurung. Kemudian pada tahun 1869, Wallace menerbitkan “The Malay Archipelago” hal ini membuat peneliti lainnya berminat untuk segera mengunjungi Taman Wisata Alam ini.

- a. Sekitar tahun 1970-an sampai tahun 1980-an pada area karst Maros-Pangkep dipilih menjadi salah satu dari kawasan konservasi dari 5 kawasan konservasi yang memiliki luas \pm 11.906,9 hektar, adalah Taman Wisata Alam Bantimurung, Taman Wisata Alam Gua Pattunuang, Cagar alam Bantimurung, Cagar alam karaenta, dan cagar alam Bulusaraung.
- b. Selanjutnya tahun 1989 Kanwil Departemen Kehutanan Sulawesi Selatan menyarankan agar dibentuknya Taman Wisata Alam Hasanuddin. Pada tahun 1993 Kongres XI International Union of Speleology memberikan rekomendasi jika kawasan Karst Maros-Pangkep untuk dijadikan situs Warisan Dunia.
- c. Rencana Konservasi Nasional pada tahun 1995 menetapkan calon TN Hasanuddin seluas 86.682 hektar.

- d. Tahun 1997 diadakan Seminar Lingkungan yang diselenggarakan di Karst PSL-UNHAS, seminar ini bertujuan untuk menjaga serta melestarikan kawasan Karst yang terletak di Maros-Pangkep.
- e. Tahun 1999, Satuan KSDA Sul-Sel I dan Unhas mengadakan pemilihan dan penyeleksian calon TN babul.
- f. Bulan Mei 2001, IUCN Asia Region Office juga UNESCO world Heritage Center melaksanakan The Asia Pasifik Forum on Karst Ecosystems and World Heritage yang terletak di gunung Mulu, Serawak, Negara Malaysia. Forum on Karst Ecosystems and World Heritage di Gunung Mulu, Serawak, Malaysia. Dari pembicaraan ini pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan juga bermanfaat yaitu wilayah karst Pangkep – Maros menjadi suatu area/kawasan konservasi. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia wilayah Karst Maros Pangkep menjadi kawasan konservasi.
- g. Di bulan November tahun 2001, Bapedal reg. III melaksanakan Simposium Maros - Pangkep . Hal ini dilaksanakan untuk menentukan pendirian TN dan Warisan yang ada di dunia.
- h. Pada 2002 dibuat tim terlatih dan terpelajar yang di sponsori oleh pemerintahan Sul – Sel untuk mendiskusikan tentang perombakan fungsi hutan.
- i. Selanjutnya pada tahun 2002 hingga tahun 2004, tim terlatih dan terpelajar menjalankan wewenangnya sehingga menghasilkan rekomendasi yang berasal dari Bupati, Gubernur dan juga DPRD.

j. Selanjutnya untuk tahun 2004 Kementrian kehutanan juga memunculkan SK.398/Menhut-II/2004 pada 18 Oktober tahun 2004 yaitu mengenai perombakan fungsi pada kawasan hutan pada tim Hutan Bantimurung Bulusaraung yang memiliki luas ± 43.750 hektar sebagai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebagai berikut: (1) Cagar alam $\pm 10.282,65$ hektar, (2) Taman wisata alam yang memiliki luas yaitu $\pm 1.624,65$ hektar, (3) Hutan lindung yang memiliki luas sebesar $\pm 21.343,10$ hektar, (4) Hutan produksi terbatas yang memiliki luas ± 145 hektar, dan (5) Hutan produksi tetap yang memiliki luas yaitu $\pm 10,355$ hektar.

Secara geografis kawasan TN Babul berada pada $199^{\circ}34'17''-119^{\circ}55'13''$ Bujur Timur juga $4^{\circ}42'49'' - 5^{\circ}06'42''$ Lintang Selatan. Secara administrasi berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Topografi taman nasional Babul ialah berbukit, bergunung, bergelombang dan datar. Untuk selanjutnya akan diperlihatkan batas-batas dari area TN Babul, sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone.
- d. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pangkep.

4.1.2 Sejarah Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusaraung

Taman Wisata Alam yang paling terkenal salah satunya adalah air terjun yang terletak di Bantimurung. Wisata alam ini (air terjun) ini adalah salah satu destinasi alam yang sangat populer dan banyak di kunjungi dimulai dari tahun 1980-an hingga sekarang. Terletak pada koordinta 5.0161059 Lintang Selatan

juga 119.6285893 Bujur Timur serta termasuk dalam kawasan alam nasional yang secara administratif berada/terletak di Dusun Bantimurung, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Wisata alam ini juga mempunyai ketinggian hingga 15 meter memiliki lebar 20 meter seras debit aliran airnya mencapai 500 l/s. Dalam hal ini, wisata alam (air terjun) Bantimurung, meskipun dalam keadaan kemarau tidak pernah mengalami kekeringan juga mengalir di sepanjang tahunnya. Tidak heran jika wisata ini ditinjau oleh beranekaragam, spesies kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki hidup serta ketertarikan pada udara yang terjaga kelestariannya. Pada tahun 1988 taman wisata alam ini dirancang oleh bupati M. Arief Wangsa. Terlaksananya pembangunan Taman Wisata Alam ini memberikan dampak yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wisata alam ini (air terjun) sejak dahulu telah menjadi destinasi wisata alam yang populer dan banyak dikunjungi setiap hari terutama pada hari libur Nasional. Banyaknya yang berkunjung ke tempat wisata ini, misalnya pengunjung yang berada didalam daerah maupun di luar daerah dapat dengan mudah untuk menemukan wisata ini dikarenakan lokasinya yang strategis. Wisata alam ini menjadi taman wisata yang mempunyai keunggulan dikarenakan udara serta oksigen yang terjaga dan juga melimpah serta pemandangan di sekitar permandian yang sangat indah untuk dipandang. Di sekitaran air terjun juga juga terdapat suatu objek wisata yang menarik lainnya yaitu Gua mimpi, gua batu, museum kupu-kupu juga dan kassi kebo. Diantaranya terdapat objek wisata yang sangat indah yaitu kupu-kupu. Keanekaragaman kupu-kupu yang terdapat di

Bantimurung membuat pengunjung menjadi senang dan berasumsi untuk dating kembali ke taman wisata ini. Keindahan kupu-kupu di Bantimurung tidak diragukan lagi karena hal ini di akui oleh dunia. Bahkan seorang naturalis, penelusuran, geografer, antropolog sekaligus ahli biologi dari Britania Raya, Alfred Russel Wallace (1857) dalam bukunya berjudul *The Malay Archipelago* menjuluki Bantimurung sebagai "The Kingdom of Butterfly".

Di sisi lain pengunjung bisa melepas gerah dengan bermain air berkedalaman sebatas pinggang orang dewasa sambil menikmati alam yang indah serta udara segar. Selain itu, kawasan ini juga terkenal sebagai gudangnya populasi kupu-kupu yang jenisnya beragam sehingga tempat ini dijuluki *The Kingdom Of Butterfly*. Ada banyak titik dengan keindahan yang cocok untuk menjadi latar belakang pengambilan gambar. Selain melakukan permandian alam, dan memanjakan mata dengan keadaan alam sekitar daerah wisata Air Terjun Bantimurung, para pengunjung pun dapat merasakan sensasi melakukan olahraga arung jeram yang menguji adrenalin, yang dimana orang akan meluncur bersama arus yang lumayan kencang menggunakan ban yg sudah disediakan oleh pengelola taman wisata. Tidak sedikit dari pengunjung pasti akan melakukan aktivitas olahraga di wisata permandian Air Terjun Bantimurung ini, mulai dari berenang, arung jeram, hingga melatih otot kaki dengan menaiki anak tangga yang diberi julukan tangga seribu oleh setiap pengunjung untuk mengunjungi sebuah gua yang berada agak jauh dari tempat permandian, gua yang dimaksud adalah Gua Mimpi yang menjadi destinasi nomor 2 di Bantimurung, dengan keindahan yang disajikan didalam gua yang membuat setiap pengunjung tertarik untuk melihat gua tersebut .

4.1.3 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dalam hal ini sektor Pariwisata sangat berpengaruh juga memiliki manfaat bagi masyarakat karena hal ini dapat menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat juga berguna sebagai sumber pendapatan. Pada zaman sekarang ini Dinas Pariwisata memiliki keuntungan yang sangat banyak karena banyaknya kunjungan wisatawan daerah dan wisatawan luar daerah membawa kontribusi bagi masyarakat juga Dinas Kebudayaan. Di zaman ini kedudukan sektor pariwisata sangat menguntungkan bagi masyarakat termasuk yang berada disekitaran Camba Kabupaten Maros. Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Maros berinisiatif untuk meningkatkan citra secara positif di daerah serta pemanfaatan juga pengelolaan terhadap sumber daya alam atau potensi yang dimiliki pariwisata.

Pariwisata adalah factor yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi yang berada di daerah, hal ini disebabkan karena kegiatannya yang dapat mendorong suatu perkembangan beberapa sektor perekonomian yang berada di daerah seperti: beberapa usaha yang baru didirikan yang ada hubungannya dengan pariwisata yaitu : hotel dan transportasi.

Kegunaan serta posisi yang sudah diakui, dari sini dapat disimpulkan bahwa pariwisata telah menjadi satu bidang yang cukup penting di samping ini terdapat

bidang lainnya yaitu, bidang pertanian, pertambangan, industri, politik dan sosial budaya karena kegiatan pariwisata dipercaya dapat menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang ada dimasyarakat, untuk meningkatkan serta pertumbuhan dalam bidang ekonomi dalam suatu daerah serta mampu memberikan dorongan yang dapat berarti terhadap peningkatan suatu kesadaran terhadap masyarakat dalam pelestarian budaya serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

Pada peningkatan untuk semangat otonomi daerah yang sudah diterapkan, peran suatu pemerintah daerah untuk menggali potensi serta pemikiran yang dapat mengembangkan Pariwisata yang berada di wilayah yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam pemerintah daerah juga harus terdapat nilai potensi secara objektif juga dapat mengidentifikasi permasalahan dan mampu untuk menemukan penyelesaian/solusi. Dalam hal ini pengembangan suatu pariwisata di daerah yang mempertimbangkan suatu aspek dari segi potensi tata ruang wisata, promosi serta fasilitas kelembagaan, sumber daya manusia yang sangat penting.

Dalam hal ini potensi Pariwisata yang berada di Kabupaten Maros sangat besar dan melimpah, obyek juga daya tarik dari wisata terbesar di darat juga yang berada di daerah laut dan pesisir. Jadi, beberapa dari kajian yang sudah pernah dilakukan,

1. Gambaran Pelaynan SKPD

Secara umum kondisi di internal dan juga eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros cukup kondusif sehingga dapat memberikan suatu peluang yang cukup besar untuk seluruh jajaran pimpinan dan juga staf guna

menjalankan wewenang dan fungsi pokok yang dari bidang masing-masing. Hal tersebut ditunjukkan dalam peningkatan sumberdaya di internal suatu organisasi dan peningkatan keikutsertaan masyarakat untuk mendukung penerapan suatu sistem dari perencanaan pembangunan suatu daerah yang lebih mengutamakan peran serta dalam masyarakat. Secara umum, perkembangan yang dimaksud dapat dicermati dari beberapa hal sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Guna melaksanakan suatu tugas pokok, fungsi serta susunan dalam organisasi juga dalam tata kerja tersebut, sesuai dalam Peraturan yang di susun oleh Pemerintahan Bupati Maros Nomor 71/XII/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros serta Peraturan Bupati Maros Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, maka Kepala Dinas dibantu oleh :

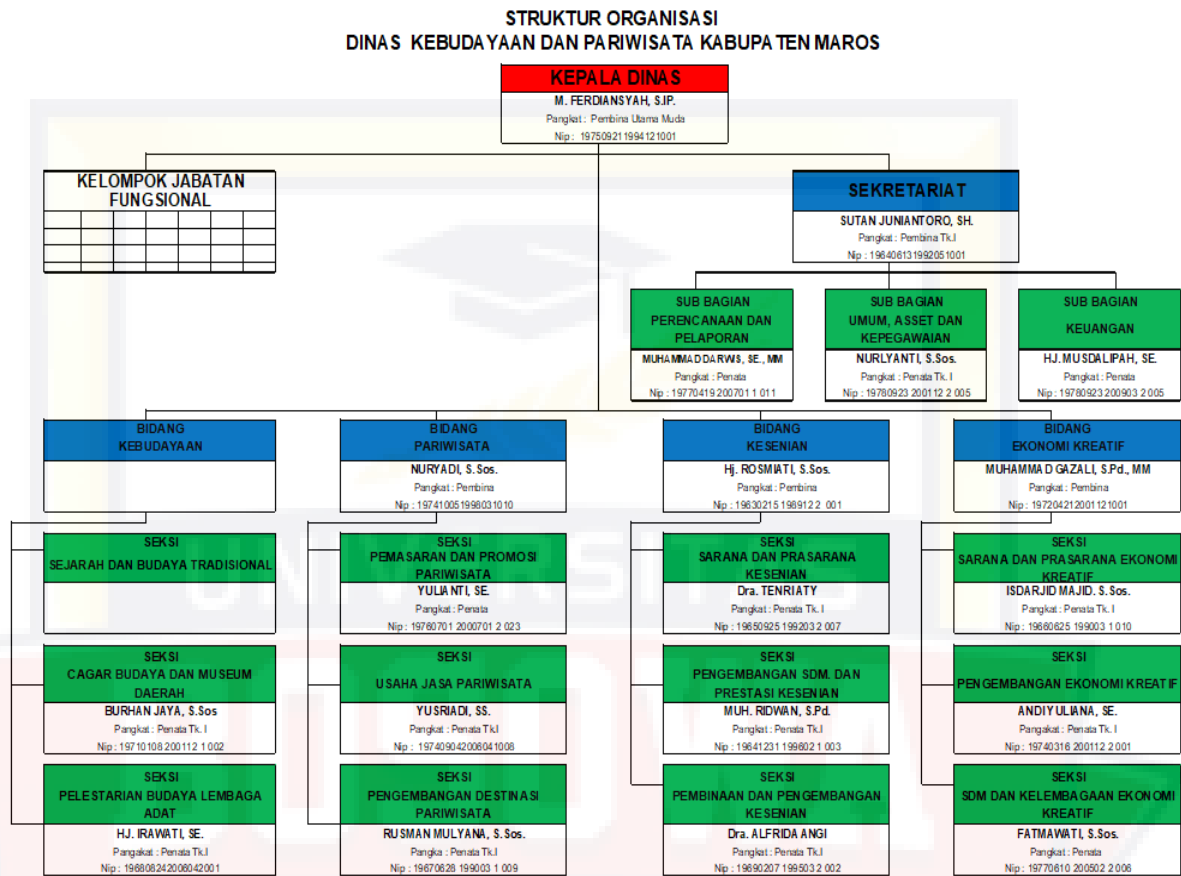
Pada Dinas di Kebudayaan serta Pariwisata yang Dipimpin oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan dibantu oleh 1 orang Sekertariat dan 4 orang Kepala yaitu:

1. Bidang kebudayaan dan sejarah
2. Bidang Kepariwisataaan
3. Bidang Ekonomi Kreatif
4. Bidang kesenian

Kemudian sekertaris dan masing-masing bidang terdiri dari sub bagian seksi yaitu:

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. ProgramSubbag
 - 3. Subbag Keuangan
- a. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi cagar budaya dan Permuseman
 - 2. Seksi sejarah dan nilai tradisional
 - 3. Seksi pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat
- b. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi
 - 2. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata
 - 3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata
- c. Bidang Kesenian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional
 - 2. Seksi Pembinaan Seni Kreasi
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
- d. Bidang ekonomi kreatif
 - 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 2. Seksi SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif

b. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros



4.1.4 Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Maros

Pembentukan suatu Organisasi juga tata kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten di Maros guna melaksanakan tugas juga fungsi yang sesuai dengan suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Adapun tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai beberapa tugas pokok yaitu membantu pimpinan dalam suatu penyelenggaraan suatu urusan di suatu bidang sejarah juga budaya kuno, pengembangan di destinasi pariwisata, pemasaran, kerjasama serta pemberdayaan masyarakat di dasarkan pada prinsip desentralisasi, juga tugas dalam pembantuan. Adapun fungsi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ialah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Mengadakan Kebudayaan serta Pariwisata.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wewenang dalam bidang kebudayaan, sejarah serta arkeologi pengembangan suatu destinasi pariwisata, pemasaran, kerjasama serta pemberdayaan dalam masyarakat . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya terkhusus pada bidang pariwisata

2. Sekretariat

Sekretariat di atur oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok seperti membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan suatu kegiatan, serta memberikan pelayanan teknis dan juga administrasi di bidang program, Keuangan, Kepegawaian, dan juga Umum.

Brikut beberapa fungsi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros:

- a. Mengkoordinasikan pada setiap pelaksanaan saat kegiatan

- b. Mengelola segala jenis permasalahan umum juga administrasi dari setiap pegawai.
 - c. Mengatur jeni keuangan financial
 - d. Mengkoordinir, memmperoleh dan menginput data seluruh penyusunan pada suatu program.
 - e. Manajemen serta pengembang pada suatu organisasi.
3. Menjalankan tugas sesuai dengan jabatan dan tugasnya.
 4. Urusan keanekaragaman kebuayaan

Departemen kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan, yang juga mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Dinas di dalam perencanaan, pembinaan, penyiapan serta bimbingan untuk segala jenis yang terdapat pada pengembangan suatu budaya di daerah serta melestariakan sumber daya nilai tradisi juga sinema yang ada.

Berikut fungsi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas kebudayaan ialah:

- a. Pengumpulan serta penyiapan sumber bahan perumusan serta kebijakan di bidang kebudayaan.
- b. Memprogram serta memfasilitasi pengadaan kegiatan budaya dan perfilman yang diselenggarakan di daerah.
- c. Mengadakan upaya untuk berjalannya penelitian tentang suatu perencanaan, bimbingan, panduan dan pengawasan kegiatan budaya yang diselenggarakan.
- d. Melaksanakan proses inventarisasi institusi yang berjalan di bidang budaya.
- e. Mengkoordinasikan dalam suatu pelaksanaan dan kegiatan suatu budaya tradisional serta film.

- f. Menyelenggarakan sosialisasi budaya tradisional dan sinema.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk pelaksanaan kebijakan disuatu bidang kebudayaan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sejarah dan Purbakala.

Departemen Sejarah serta Purbakala yang dipimpin kepala divisi dan memiliki wewenang khusus yaitu membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, penyiapan untuk bahan dan pedoman serta petunjuk teknis dalam sejarah serta arkeologi.

Fungsi dari Kepala Departemen Sejarah dan Purbakala Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- a. Perumusan suatu kebijakan teknis di bidang sejarah dan juga purbakala.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan serta kegiatan pada bidang sejarah dan juga arkeologi.
- c. Pelaksanaan untuk bimbingan teknis, koordinasi serta evaluasi sejarah dan arkeologi.
- d. Pelaksanaan pada tugas kedinasan lainnya dengan bidang serta wewenangnya.

5. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pada bidang pengembangan pariwisata ini dipimpin Kepala Bidang yang memiliki tugas yang pokok untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

perencanaan, penyusunan suatu program, serta bimbingan teknis untuk pengembangan destinasi.

Adapun fungsi dari Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- a. Pengumpulan serta menyiapkan bahan perumusan suatu kebijakan di bidang pengembangan suatu pariwisata.
- b. Program penyiapan dan fasilitasi untuk pelaksanaan suatu kegiatan sarana dan prasarana, serta pengelolaan pada objek dan daya tarik suatu wisata.
- c. Mengkoordinasikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan terhadap pengembangan destinasi pariwisata tersebut.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk pelaksanaan suatu kebijakan yang terkait dengan pengembangan suatu pariwisata.
- e. Pelaksanaan pada tugas lain kemudian diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas serta fungsinya.
6. Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan suatu Masyarakat.

Departemen utama Pemasaran, Kerjasama serta Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Dinas pada suatu perencanaan dan pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman serta pendampingan pedoman teknis pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakatnya.

Fungsi Kepala Pemasaran adalah Mengatur kerjasama dan Pemasaran Pemberdayaan kepada Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan penyiapan untuk bahan perumusan suatu kebijakan di bidang pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan suatu masyarakat.
- b. Penyusunan suatu program dan fasilitasi pelaksanaan dalam kegiatan pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Koordinasi pada pelaksanaan di bidang pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan sosialisasi di bidang pemasaran, kerjasama juga Pemberdayaan untuk masyarakat.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dan sesuai dengan tugas serta fungsinya.

4.1.5 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan adalah arah untuk pelaksanaan setiap urusan yang wajib dan pilihan untuk mendukung suatu pelaksanaan kunjungan pembangunan di suatu daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dari pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran berusaha untuk dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umumnya, potensi, permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi kedepan yang sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan urusan Kebudayaan juga Pariwisata, menyusun tujuan dan yang berpedoman sasaran. dalam setiap Misi pembangunan

dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021. Adapun tujuan serta sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016-2021 yang di dukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

1. Misi 1: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
 - b. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
 - c. Meningkatnya Pendapatan Daerah.
 - d. Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat.

2. MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi, dengan sasaran:
- Sebuah. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.

Setelah melihat setiap misi dan sasaran pada RPJMD, maka rumusan serta tujuan dan sasaran oleh RPJMD tersebut akan menjadi landasan untuk perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 5 tahun. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Turunkan secara lebih operasional untuk masing-masing tujuan dan juga sasaran oleh RPJMD yang telah ditetapkan.

2. Disusun SERTA memperhatikan permasalahan terhadap isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan tugas pokok, kewenangan, fungsi, serta urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan.
3. Dapat diukur pada jangka waktu 5 tahun kedepan.
4. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dijangkau.
5. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan.
6. Memenuhi Kriteria SMART-C
7. Merumuskan indikator sasaran (Dampak) yang mendukung dan mendukung indikator sasaran RPJMD.

4.2 Deskripsi Data

Hasil dari perhitungan terhadap kontribusi untuk nilai retribusi taman wisata alam Bantimurung yang disumbangkan terhadap nilai PAD Kabupaten Maros, diperlihatkan data table 4.1 dengan menggunakan rumus kontribusi, yaitu :

$$Ktr = \frac{RetTWAB}{PAD\ Kab.\ Maros} \times 100\%$$

Dimana : Ktr = Besarnya kontribusi nilai retribusi TWAB terhadap PAD Kabupaten Maros.

RetTWAB = Besarnya nilai retribusi Taman Wisata Alam Bantimurung

PAD Kab. Maros = besarnya nilai PAD Kabupaten Maros

Perhitungan besarnya kontribusi nilai penerimaan retribusi Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros dari tahun 2016 ke tahun 2020 sebagai berikut:

TABEL 4.1

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI

TAMAN WISATA ALAM BANTIMURUNG PADA

TAHUN 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	target	Realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Realisasi
TWA Bantimurung	7.850.000.000	7.432.686.300	6.500.000.000	5.896.292.400	7.000.000.000	6.233.231.800	7.150.000.000	7.343.817.000	6.650.000.000	4.286.858.000

Sesuai tabel diatas pada tahun 2016-2018 realisasi retribusi tidak mencapai sesuai target yang ditentukan, namun di tahun 2019 mencapai atau bahkan melebihi target yang ditentukan, tetapi pada tahun 2020 hanya melebihi setengah dari yang ditargetkan. Hal ini dipicu dari adanya pandemic covid-19 sehingga seluruh tempat wisata yang ada di kabupaten Maros terkhusus taman wisata alam Bantimurung mengalami penutupan untuk sementara sesuai dengan surat edaran Pemerintah yang berlaku.

TABEL 4.2

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros
2016	Rp 165.487.675.628
2017	Rp 194.999.053.694
2018	Rp 219.844.779.862
2019	Rp 227.998.857.884
2020	Rp 219.096.914.071

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi 2016} &= \frac{\text{Ret TWAB 2016}}{\text{PAD Kab. Maros 2016}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 7.432.686.300}}{\text{Rp 165.487.675.628}} \times 100\% \\
 &= 4,49\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi 2017} &= \frac{\text{Ret TWAB 2017}}{\text{PAD Kab. Maros 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 5.896.292.400}}{\text{Rp 194.999.053.694}} \times 100\% \\
 &= 3,02\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi 2018} &= \frac{\text{Ret TWAB 2018}}{\text{PAD Kab. Maros 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 6.233.231.800}}{\text{Rp 219.844.779.862}} \times 100\% \\
 &= 2,83\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi 2019} &= \frac{\text{Ret TWAB 2019}}{\text{PAD Kab. Maros 2019}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 7.343.817.000}}{\text{Rp 227.998.857.884}} \times 100\% \\
 &= 3,22\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi 2020} &= \frac{\text{Ret TWAB 2020}}{\text{PAD Kab. Maros 2020}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 4.286.858.000}}{\text{Rp 219.096.914.071}} \times 100\% \\
 &= 1,95\%
 \end{aligned}$$

TABEL 4.3
PERHITUNGAN KONTRIBUSI NILAI RETRIBUSI TWA BANTIUMURUNG
TERHADAP PAD KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 - 2020

Tahun	Nilai Retribusi TWAB (Rp)	PAD Kab.Maros (Rp)	Besarnya kontribusi (%)
2016	7.432.686.300	165.487.675.628	4,49%
2017	5.896.292.400	194.999.053.694	3,02%
2018	6.233.231.800	219.844.779.862	2,83%
2019	7.343.817.000	227.998.857.884	3,22%
2020	4.286.858.000	219.096.914.071	1,95%

Sumber data : tabel 4.1 dan 4.2

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai dari penerimaan PAD Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019, namun pada tahun 2020 PAD Kabupaten Maros mengalami penurunan. Dari perhitungan kontribusi nilai penerimaan retribusi taman wisata alam Bantimurung terhadap PAD Kabupaten Maros tahun 2016 – 2020 terlihat bahwa nilai kontribusi yang terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai 4,49%, sedangkan nilai kontribusi 4 tahun setelahnya relatif rendah atau menurun terlihat di tahun 2020 adalah nilai maksimal 1,95%, hal ini disebabkan terjadinya pandemic covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibuat untuk mnecegah penyebaran virus corona di Indonesia sehingga parawisatawan baik local maupun mancanegara menurun secara drastic pada tahun tersebut. Sehingga dapat kita ketahui kontribusi di Taman Wisata Alam Bantimurung sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

Penulis melakukan wawancara mengenai apa saja jenis retribusi yang ada di taman wisata alam Bantimurung, berikut pemaparannya :

“Retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan peraturan Bupati, jadi ada beberapa jenis retribusi yang diberlakukan di Bantimurung yaitu retribusi tiket masuk, kemudian retribusi parker, retribusi penyewaan fasilitas hotel, penginapan, gazebo, baruga utama dan aula pertemuan jadi itumi adalah beberapa retribusi yang ada di taman wisata alam Bantimurng yang di kelola oleh Dinas Pariwisata.”(Kepala bidang Pariwisata)

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Yusriadi selaku kepala bidang menyampaikan bahwa ada beberapa jenis retribusi di taman wisata alam bantimurung yaitu tiket masuk, retribusi parkir, penginapan dan lain-lain. Dari hasil retribusi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang sudah tidak layak di taman wisata alam Bantimurung itu sendiri.

Penulis juga melakukan wawancara mengenai cara meningkatkan jumlah kunjungan *“Yaitu salah satunya melakukan promosi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengembangan objek daya tarik pernah kita lakukan pada tahun 2015 yaitu dengan membangun wahana permandian waterpark dan itu terbukti jumlah pengunjung mengalami peningkatakn pada tahun itu.”*

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan, upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola taman wisata alam Bantimurung untuk meningkatkan jumlah pengunjung dilakukan penambahan wisata atau penambahan kolam renang waterpark sehingga membuat para pengunjung tidak merasa bosan serta

menambah daya tarik pengunjung dengan adanya penambahan kolam waterpark tersebut.

a. Potensi dan Daya Tarik Taman Wisata Alam Bantimurung

Selain memiliki objek wisata air terjun yang indah, taman wisata alam ini dikenal juga menjadi habitat yang ideal untuk keanekaragaman kupu-kupu, serangga, burung, dan yang langka serta endemik. Objek wisata ini telah dijadikan andalan bagi warga masyarakat perkotaan khususnya masyarakat Makassar. Berdasarkan letaknya administratif, TWA Bantimurung terletak di dusun Bantimurung, Desa Jenetaesa, kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wilayah ini di kelola oleh kerja sama pihak Balai TN BABUL KLHK dan Disbudpar Pemkab Maros. Pada tahun 1856 – 1857 seorang naturalis Inggris yang terkemuka bernama Alfred Russel Wallace menghabiskan hidupnya di kawasan ini untuk menikmati dan meneliti 150 spesies kupu-kupu yang tidak di jumpai di daerah lain seperti spesies papilio Androcles.

Wallace menjuluki kawasan ini sebagai *the kingdom of Butterfly* karena keanekaragaman jenis kupu-kupu. Di kawasan ini juga terdapat beberapa gua dengan stalaktit dan stalakmitnya yang menakutkan dan apabila kita berada didalam gua tersebut serasa di alam mimpi, salah satunya yaitu gua mimpi dengan panjang lorong 1.500m dan memiliki ornament-ornamen yang sangat menakutkan. Kawasan ini dapat menjanjikan daya tarik khusus sehingga banyak dikunjungi oleh pengunjung, terutama sesaat memasuki hari libur. Kawasan ini tidak hanya menyajikan panorama alam nan sejuk dengan kicauan aneka burung-burungnya yang menarik, tetapi juga memiliki air terjun yang indah.

4.3 Analisa Data

4.3.1 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam Meningkatkan PAD melalui Pengembangan objek wisata alam

Bantimurung

a. Faktor Pendorong Pengembangan Objek Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil dari penelitian yang didapatkan dari pengamatan secara langsung, wawancara, dan data yang didapatkan dari disbudpar kabupaten Maros di obyek wisata alam Bantimurung ini, maka peneliti mengidentifikasi hasil penilaian ini terhadap pengembangan potensi objek wisata.

1. Daya tarik

- a. Penginapan yang cukup mewah
 - b. Keaneka ragaman spesies kupu-kupu
 - c. Air terjun yang indah
 - d. Danau kassi kebo
 - e. Gua batu
 - f. Gua mimpi yang cerita mitosnya masih kental di kalangan masyarakat
 - g. Kolam renang dengan sumber air langsung dari pegunungan.
- ##### b. Faktor Penghambat Pengembangan Objek Wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros

1. Faktor Internal

Pengembangan objek wisata pasti tidak lepas dari adanya faktor-faktor penghambat. Beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan kurangnya daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Maros ialah belum tertatanya dengan baik berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana objek wisata di Kabupaten. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menunjang pariwisata juga masih rendahnya kualitas pariwisata di Kabupaten Maros.

2. Faktor Eksternal

- a. Menurunnya penghasilan masyarakat disebabkan oleh pandemic covid-19
- b. Kurangnya perhatian masyarakat sekitar terhadap objek wisata
- c. Kurangnya rasa peduli lembaga swasta terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan.
- d. Kurangnya informasi dan promosi
- c. Pengembangan objek wisata .

Pengembangan suatu pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan yang baik bagi wisata alam maupun warga setempat. Basis pengembangan pada pariwisata adalah potensi serta sumber daya keragaman budaya, seni, dan pesona alam. Pengembangan dari sumber daya tersebut di kelola melalui pendekatan yang dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya secara terpadu antara pengembangan suatu produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui

pendekatan pemberdayaan kepada masyarakat local dalam rangka untuk pengembangan pariwisata. Dalam GBHN 1999 disebutkan bahwa pengembangan pariwisata dapat melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, agronomis, social budaya, hemat energi, melestarikan alam dan juga tidak merusak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan kepariwisataan memiliki 3 fungsi yaitu :

1. Menggalakkan kegiatan ekonomi
2. Memelihara kepribadian suatu bangsa dan kelestarian serta fungsi lingkungan hidup tersebut
3. Memupuk rasa cinta tana air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat dan juga nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut agar tercapainya suatu fungsi diatas maka harus ditempuh 3 macam upaya yaitu, pengembangan suatu obyek dan daya tarik wisata, meningkatkan dan pengembangan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan, Setianingsih 2006:44.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, kontribusi taman wisata alam Bantimurung terhadap PAD Kabupaten Maros dapat di simpulkan sebagai berikut:

Dapat kita lihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh pihak taman wisata alam sangat berpengaruh meskipun angkanya masih terbilang rendah, dari data dapat kita lihat dari tahun ke tahun belum mencapai target tetapi kontribusi taman wisata alam Bantimurung sangat berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Maros namun semenjak pandemic covid-19 kontribusi taman wisata alam Bantimurung terhadap PAD menurun dikarenakan adanya pemberlakuan atau di tutupnya untuk sementara wisata alam Bantimurung sehingga tidak adanya pemasukan dari manapun.

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kepariwisata Kabupaten Maros dalam mengembangkan suatu objek wisata alam Bntimurung yaitu :
 - a. Adanya upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana sehingga dapat memberi kenyamanan bagi wisatawan.
 - b. Penambahan wahana baru yang dapat menarik wisatawan.
 - c. Melakukan promosi melalui social media, melaksanakan *event* budaya, serta mendatangkan *influencer* yang dapat membantu promosi.
2. Faktor dalam pengembangan objek wisata alam Bantimurung diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pendorong, adanya daya tarik yang beragam pada setiap objek wisata alam Bantimurung, seperti air terjun yang indah, dapat merasakan langsung pegunungan karts, gua batu yang sangat indah, serta hotel/penginapan yang sangat mewah dan sangat menyajikan nuansa alam yang sejuk.
- b. Faktor penghambat dari sisi internal, fasilitas yang ada di dalam wisata masih belum bias digunakan sepenuhnya, setiap fasilitas dikenakan tarif bebayar bagi pengunjung yang ingin merasakannya, kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang masih kurang, penghambat dari sisi eksternal: menurunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi covid-19, serta kesadaran masyarakat setempat masih kurang terhadap percepatan pariwisata.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap PAD Kabupaten Maros, saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Maros: objek wisata yang telah dikelola harusnya dijaga dengan baik, harus tetap bersinergi dengan pihak masyarakat setempat ataupun pihak desa/kecamatan objek wisata tersebut agar pengelolaannya semakin baik dan melengkapi sarana dan prasarana pada objek wisata alam Bantimurung agar objek yang dikelola tidak terbengkalai. Serta pihak Dinas Pariwisata harusnya menambah wahana baru sehingga wisatawan tidak merasa jenuh dan bosan dengan keadaan yang tidak menarik.

- b. Bagi pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dalam situasi penanganan Covid-19 agar para wisatawan yang berkunjung ke wisata alam Bantimurung bisa menerima pelayanan dan perlindungan yang baik. Pemerintah setempat juga dapat mengedepankan fasilitas yang baik serta bekerjasama bagi pihak tertentu, serta selalu menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk wisatawan, dan pengelolaan objek-objek wisata dan anggaran perbaikan objek wisata masih perlu ditingkatkan.
- c. Bagi Wisatawan, jika mengunjungi objek wisata alam bantimurung, tetap patuhi aturan dan himbauan yang berlaku, serta tetap menjaga kebersihan dan etika pada sekitar objek wisata
- d. Bagi masyarakat, menciptakan inovasi baru serta selalu mengikuti pelatihan-pelatihan pembuatan kerajinan tangan, sehingga dapat menambah inovasi produk yang di jual di sekitaran tempat wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Carrunia, 2017 : 119 teori pendapatan asli daerah.
- Chafid Fandeli, 2001, *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Finta Ardiana Syahrana, 2013, Naskah Publikasi, "Analisis Kemampuan PAD Kabupaten Pacitan Dalam Membiayai Belanja Daerah", Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Gamal Suwantor, 2004 : 19 teori objek wisata.
- Hasan, 2005, Karya Ilmiah, "Analisis Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah terhadap PAD di Kabupaten Enrekang, Makassar.
- I Gde Pitana, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sidik, 2000, prinsip-prinsip perpajakan.
- Sjafrizal, 2015, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada.
- Syahrul, 2005, Karya Ilmiah "Kontribusi Kawasan Wisata Alam Malino dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Gowa, Makassar.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009, 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Beserta Pejelasanannya, Jakarta, Visimedia

LAMPIRAN

Pengambilan data PAD Kabupaten Maros



**Wawancara terkait PAD oleh Kepala Bidang Pariwisata
Kabupaten Maros**



Lokasi Wisata Alam Bantimurung



Wawancara dengan salah satu penduduk sekitar



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**Jl. Jenderal Sudirman Kompleks Kantor Bupati Kabupaten
Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Telp./Fax. (0411) 371102
Kode Pos 90516**

Email : pariwisata@maroskab.go.id, website : maroskab.go.id

**DAFTAR REALISASI PAD SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2016 –
2020**

TAHUN	PAD MAROS	TARGET PAD PARIWISATA	REALISASI PAD PARIWISATA	PERSENTASE
2016	176.118.724.400	9.380.000.000	8.430.454.400	4,79%
2017	180.353.000.000	8.650.000.000	8.041.281.300	4,46%
2018	202.645.000.000	9.250.000.000	7.870.106.000	3,88%
2019	288.807.562.871	9.060.000.000	9.036.560.000	3,13%
2020	311.275.814.871	8.385.000.000	4.787.522.000	1,54%

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2016 dan 2015**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	1.481.786.230.460,00	1.374.566.925.494,76	92,76	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	176.118.724.400,00	165.487.675.628,16	93,96	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	78.551.000.000,00	70.683.640.411,95	89,98	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.500.000.000,00	1.717.188.126,00	114,48	-
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.500.000.000,00	1.717.188.126,00	114,48	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59	-
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59	-
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	27.480.000,00	54,96	-
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	50.000.000,00	27.480.000,00	54,96	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	500.000.000,00	591.769.953,00	118,35	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	500.000.000,00	591.769.953,00	118,35	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	19.000.000.000,00	20.944.268.154,00	110,23	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	19.000.000.000,00	20.944.268.154,00	110,23	-
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	7.000.000.000,00	7.769.723.592,00	111,00	-
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	7.000.000.000,00	7.769.723.592,00	111,00	-
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	496.813.980,00	99,36	-
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	496.813.980,00	99,36	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	14.000.000.000,00	6.630.868.869,00	47,36	-
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	14.000.000.000,00	6.630.868.869,00	47,36	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	14.000.000.000,00	10.238.786.045,00	73,13	-
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	14.000.000.000,00	10.238.786.045,00	73,13	-
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	16.000.000.000,00	14.191.060.472,95	88,69	-
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	16.000.000.000,00	14.191.060.472,95	88,69	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	64.503.500.000,00	56.145.613.762,43	87,04	-
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	43.020.000.000,00	38.647.230.174,00	89,84	-
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	2.600.000.000,00	1.814.555.113,00	69,79	-
1.1.2.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	40.420.000.000,00	36.832.675.061,00	91,12	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	110.300.000,00	73,53	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	110.300.000,00	73,53	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.500.000.000,00	1.094.905.650,00	72,99	-
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	1.500.000.000,00	1.094.905.650,00	72,99	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	280.000.000,00	249.087.500,00	88,96	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017 dan 2016

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	1.418.289.224.853,00	1.299.787.473.996,01	91,64	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	255.585.977.000,00	194.999.053.694,01	76,29	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	96.801.000.000,00	102.810.769.324,60	106,21	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.750.000.000,00	1.838.604.867,00	105,06	-
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.750.000.000,00	1.838.604.867,00	105,06	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62	-
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62	-
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	56.417.650,00	112,84	-
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	50.000.000,00	56.417.650,00	112,84	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	700.000.000,00	798.930.604,00	114,13	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	700.000.000,00	798.930.604,00	114,13	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	22.000.000.000,00	23.760.223.662,00	108,00	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	22.000.000.000,00	23.760.223.662,00	108,00	-
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	8.450.000.000,00	9.326.341.740,00	110,37	-
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	8.450.000.000,00	9.326.341.740,00	110,37	-
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	507.469.640,00	101,49	-
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	507.469.640,00	101,49	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	11.500.000.000,00	8.537.267.212,00	74,24	-
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	11.500.000.000,00	8.537.267.212,00	74,24	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.500.000.000,00	23.036.824.274,00	112,37	-
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.500.000.000,00	23.036.824.274,00	112,37	-
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	22.500.000.000,00	23.918.161.711,60	106,30	-
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	22.500.000.000,00	23.918.161.711,60	106,30	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	18.735.000.000,00	17.844.884.895,26	95,25	-
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	600.000.000,00	2.112.523.756,00	352,09	-
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	600.000.000,00	2.112.523.756,00	352,09	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	175.300.000,00	58,43	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	175.300.000,00	58,43	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	2.000.000.000,00	1.356.559.375,00	67,83	-
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	2.000.000.000,00	1.356.559.375,00	67,83	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	270.642.000,00	90,21	-
1.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	270.642.000,00	90,21	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN - LRA	1.490.956.817.605,00	1.414.913.465.724,41	94,90
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	273.006.174.554,00	219.844.779.862,41	80,53
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	134.073.149.058,00	117.385.115.855,00	87,55
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.964.713.939,00	2.130.969.014,00	108,46
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.964.713.939,00	2.130.969.014,00	108,46
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	70.000.000,00	77.619.850,00	110,89
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	70.000.000,00	77.619.850,00	110,89
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	916.000.000,00	943.938.385,00	103,05
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	916.000.000,00	943.938.385,00	103,05
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	25.200.000.000,00	26.959.170.165,00	106,98
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	25.200.000.000,00	26.959.170.165,00	106,98
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	12.700.000.000,00	13.391.582.900,00	105,45
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	12.700.000.000,00	13.391.582.900,00	105,45
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	530.000.000,00	533.141.990,00	100,59
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	530.000.000,00	533.141.990,00	100,59
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	6.300.000,00	25,20
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	6.300.000,00	25,20
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31.437.435.119,00	9.205.629.770,00	29,28
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	31.437.435.119,00	9.205.629.770,00	29,28
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.000.000.000,00	20.789.034.673,00	103,95
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.000.000.000,00	20.789.034.673,00	103,95
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	27.630.000.000,00	29.125.121.669,00	105,41
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	27.630.000.000,00	29.125.121.669,00	105,41
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	21.795.000.000,00	21.050.163.668,09	96,58
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	350.000.000,00	574.967.500,00	164,28
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	350.000.000,00	574.967.500,00	164,28
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	218.873.500,00	72,96
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	218.873.500,00	72,96
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.000.000.000,00	4.134.243.880,00	103,36
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	4.000.000.000,00	4.134.243.880,00	103,36
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	288.270.500,00	96,09
1.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	288.270.500,00	96,09
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	443.220.000,00	147,74
1.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	443.220.000,00	147,74
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	535.000.000,00	331.181.500,00	61,90
1.1.2.15.02.	Laboratorium - LRA	35.000.000,00	22.331.500,00	63,80

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN - LRA	1.497.906.779.871,00	1.365.290.555.352,00	91,15
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	288.807.562.871,00	227.998.857.884,00	78,94
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	153.408.500.000,00	151.995.622.929,33	99,08
1.1.1.05.	Pajak Rokok - LRA	-	17.113.782.144,33	-
1.1.1.05.01.	Pajak Rokok - LRA	-	17.113.782.144,33	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	2.200.000.000,00	2.467.760.366,00	112,17
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	2.200.000.000,00	2.467.760.366,00	112,17
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	123.500.000,00	162.339.062,00	131,45
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	123.500.000,00	162.339.062,00	131,45
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1.050.000.000,00	1.077.432.152,00	102,61
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1.050.000.000,00	1.077.432.152,00	102,61
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	27.715.000.000,00	26.741.423.483,00	96,49
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	27.715.000.000,00	26.741.423.483,00	96,49
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	13.000.000.000,00	11.282.075.700,00	86,79
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	13.000.000.000,00	11.282.075.700,00	86,79
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	550.000.000,00	584.127.600,00	106,21
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	550.000.000,00	584.127.600,00	106,21
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	15.300.000,00	76,50
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	15.300.000,00	76,50
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31.000.000.000,00	9.226.327.075,00	29,76
1.1.1.14.19.	Marmar - LRA	31.000.000.000,00	9.226.327.075,00	29,76
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21.100.000.000,00	22.549.488.951,00	106,87
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21.100.000.000,00	22.549.488.951,00	106,87
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	42.100.000.000,00	44.819.638.798,00	106,46
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	42.100.000.000,00	44.819.638.798,00	106,46
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.222.000.000,00	21.820.587.100,53	98,19
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	400.000.000,00	488.765.500,00	122,19
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	400.000.000,00	488.765.500,00	122,19
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	250.000.000,00	191.765.000,00	76,71
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	250.000.000,00	191.765.000,00	76,71
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.750.000.000,00	3.463.704.094,00	92,37
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	1.350.000.000,00	1.147.053.294,00	84,97
1.1.2.06.06.	Retribusi Jasa Pelayanan Pasar - LRA	2.400.000.000,00	2.316.650.800,00	96,53
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	198.175.000,00	66,06
1.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	198.175.000,00	66,06
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	328.980.000,00	109,66

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN - LRA	1.456.868.058.842,00	1.380.928.002.665,97	94,79
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	292.857.252.818,00	219.096.914.071,44	74,81
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	144.727.000.000,00	110.723.082.095,00	76,50
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.725.000.000,00	2.025.210.911,00	117,40
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.725.000.000,00	2.025.210.911,00	117,40
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	9.000.000.000,00	9.825.435.731,00	109,17
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	9.000.000.000,00	9.825.435.731,00	109,17
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	125.000.000,00	151.655.925,00	121,32
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	125.000.000,00	151.655.925,00	121,32
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	850.000.000,00	899.333.821,00	105,80
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	850.000.000,00	899.333.821,00	105,80
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	28.000.000.000,00	30.030.054.766,00	107,25
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	28.000.000.000,00	30.030.054.766,00	107,25
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	8.000.000.000,00	6.210.598.650,00	77,63
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	8.000.000.000,00	6.210.598.650,00	77,63
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	400.000.000,00	532.315.120,00	133,08
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	400.000.000,00	532.315.120,00	133,08
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	27.000.000,00	8.900.000,00	32,96
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	27.000.000,00	8.900.000,00	32,96
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31.795.000.000,00	2.399.027.210,00	7,55
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	31.795.000.000,00	2.399.027.210,00	7,55
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	25.100.000.000,00	24.340.661.910,00	96,97
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	25.100.000.000,00	24.340.661.910,00	96,97
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	39.705.000.000,00	34.299.888.051,00	86,39
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	39.705.000.000,00	34.299.888.051,00	86,39
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	19.337.000.000,00	15.239.082.951,97	78,81
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	200.000.000,00	634.918.501,00	317,46
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	200.000.000,00	634.918.501,00	317,46
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	170.000.000,00	122.300.000,00	71,94
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	170.000.000,00	122.300.000,00	71,94
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.100.000.000,00	2.984.508.155,00	72,79
1.1.2.06.02.	Los - LRA	-	6.090.000,00	-
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	-	5.021.500,00	-
1.1.2.06.05.	Parkir - LRA	150.000.000,00	-	-
1.1.2.06.06.	Retribusi Jasa Pelayanan Pasar - LRA	3.950.000.000,00	2.973.396.655,00	75,28
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	350.000.000,00	353.580.000,00	101,02
1.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA	350.000.000,00	353.580.000,00	101,02
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	250.000.000,00	159.490.000,00	63,80



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Maros Prov. SulSel, Kode Pos 90511

Email : pariwisata@maroskab.go.id, website : www.maroskab.go.id

DATA PENGUNJUNG TWA BANTIMURUNG TAHUN 2019

NO	DATA PENGUNJUNG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	PENGUNJUNG LOKAL (HARI KERJA)	5578	4613	6738	16613	7297	23519	28440	16329	12991	15714	11541	24950	174323
2	PENGUNJUNG LOKAL (HARI LIBUR)	7745	4199	6108	23804	14194	35073	23758	10276	18240	15745	19239	31126	209507
3	TOURIS (HARI KERJA)	82	8	65	5	14	32	75	59	33	36	14	13	436
4	TOURIST (HARI LIBUR)	1	0	4	24	7	10	7	5	3	2	5	23	91

DATA PENGUNJUNG BANTIMURUNG WATERPARK TAHUN 2019

NO	DATA PENGUNJUNG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	PENGUNJUNG LOKAL	6169	2013	3152	8136	4899	9340	6013	1944	2022	2130	2879	4958	53682

DATA PENGUNJUNG LEANG – LEANG TAHUN 2019

NO	DATA PENGUNJUNG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	PENGUNJUNG LOKAL (HARI KERJA)	2015	1731	3496	5138	1820	4325	4321	2545	3158	2921	3620	3787	38967
2	TOURIST	50	17	55	40	49	55	109	93	96	133	66	28	791



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Maros Prov. SulSel, Kode Pos 90511

Email : pariwisata@maroskab.go.id, website : www.maroskab.go.id

DATA PENGUNJUNG 2018

NO	DATA PENGUNJUNG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	PENGUNJUNG LOKAL (HARI KERJA)	8142	5749	8323	9127	14802	10467	18113	14075	12900	11450	10259	8814	132221
2	PENGUNJUNG LOKAL (HARI LIBUR)	13342	4241	6954	15193	29963	43697	15500	11812	16000	9650	10177	7550	182079
3	TOURIS (HARI KERJA)	13	45	12	29	16	11	40	43	28	23	4	4	275
4	TOURIST (HARI LIBUR)	4	6	2	8	5	10	14	10	7	11	1	0	78